**IMPLEMENTASI SURAT EDARAN JAKSA AGUNG NOMOR: B-113/F/FD.1/05/2010
DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN KERUGIAN
NEGARA YANG KECIL OLEH KEJAKSAAN TINGGI RIAU.**

Oleh : Sandi Ersya Arrasid

Pembimbing 1 : Dr. Evi Deliana HZ., SH., LL.M.

Pembimbing 2 : Dr. Davit Rahmadan, SH., MH.

Alamat : Jln. Cendrawasih, Pekanbaru

Email : sandi.ersya4148@student.unri.ac.id - Telepon : 082284107194

ABSTRACT

Corruption is a serious crime, then the effort to eradicate corruption needs to be done seriously, and continuously. Settlement of corruption cases based on the Attorney General's Circular Letter Number B-113 / F / Fd.1 / 05/2010 uses the concept of restorative justice by prioritizing the return of state financial losses in cases of corruption with small losses. The purpose of this research are: first, to find out how to resolve corruption with small losses using the Attorney General Circular Letter Number: B-113 / F / Fd.1 / 05/2010 based on the concept of restorative justice in the Riau High Prosecutor's Office, second, to know the obstacles in the implementation of the Attorney General's Circular Letter.

This type of research can be classified in the type of sociological research, namely direct research at or the place under study. This research was conducted at the Riau High Prosecutor's Office, while the population and sample were parties related to the problem examined in this study, the source of the data used were primary data and secondary data, the data collection methods in this study were interviews and library research.

From the results of the research problem there are two main things that can be concluded. First, the settlement of corruption with a small state loss based on the Attorney General's Circular Letter. The method of resolution is carried out by the prosecutor by issuing a Notification of the Progress of Investigation A2 (cases cannot be upgraded to an investigation), an Order to Stop an Investigation (SP3), and a P-26 Termination of Prosecution (SKPP) Decree. Second, the obstacles in the application of the Attorney General's Circular Letter Number both external and internal obstacles, such as irreversible state losses, non-cooperative perpetrator, legal position of Attorney General's Circular Letter, absence of determination loss limits in Attorney General's Circular Letter, and the prosecutor's bureaucratic structure that is nuanced by the command. The author's suggestion, first, the prosecutor's office should prioritize the concept of restorative justice in handling corruption cases with a small state loss. Second, special legislation is made regarding restorative justice in order to provide legal certainty.

Keywords: Corruption Crime – Restorative Justice - Attorney General's Circular Letter

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*rechstaat*) dan bukan atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Ini berarti bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.¹

Pemerintah Indonesia sebagai penyelenggara negara dituntut untuk memajukan kesejahteraan umum yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah berkewajiban untuk membangun infrastruktur dan pendidikan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, disamping itu juga terjadi peningkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Salah satu tindak pidana yang dapat dikatakan cukup fenomenal adalah masalah korupsi.²

Korupsi terjadi secara sistematis, sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Sehingga, korupsi dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang serius (*serious crime*), maka upaya pemberantasan korupsi perlu dilakukan secara serius, terus-menerus, dan berkesinambungan.³

¹ Mexasasai Indra, "Rekonseptualisasi pengaturan pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi". Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 4, No. 3 September 2014, hlm. 139.

² Akil Mochtar, *Memberantas Korupsi: Efektivitas Sistem Pembalikan Beban Pembuktian dalam Gratifikasi*, Q-Communication, Jakarta: 2006, hlm. 65.

³ Bambang Waluyo, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)*, Sinar Grafika, Jakarta: 2016, hlm. 79.

Wewenang penyidikan tindak pidana korupsi merupakan wewenang Kejaksaan, berdasarkan pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Wewenang untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana korupsi lebih khususnya lagi dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, berfungsi sebagai pemimpin dan koordinator penyidikan dan penuntutan pidana khusus dibawah Jaksa Agung.⁴ Lebih lanjut, Kejaksaan sebagai lembaga juga dapat mengeluarkan surat edaran, surat edaran adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting.⁵

Salah satu surat edaran yang dikeluarkan Kejaksaan adalah Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Nomor: B-113/F/Fd.1/05/2010 perihal prioritas dan pencapaian dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi tanggal 18 Mei 2010 (untuk selanjutnya disebut sebagai SEJA). SEJA tersebut berisi perintah kepada kepala kejaksaan diseluruh indonesia agar memprioritaskan perkara tipikor yang bersifat *big fish* (berskala besar, dilihat dari pelaku dan/atau nilai kerugian) dan perkara tipikor yang dilakukan terus menerus (*still going on*). SEJA ini menekankan bagi masyarakat yang melakukan tindak pidana korupsi dengan kerugian kecil (di bawah Rp. 100 Juta)⁶ dan

⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 2004, hlm. 71.

⁵ Pasal 1 butir 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas.

⁶ Wawancara dengan Bapak Subekhan, SH.,MH, Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Riau, Hari Selasa, tanggal 16 April 2019, Bertempat di Kejaksaan Tinggi Riau.

telah mengembalikan kerugiannya, maka dapat digunakan konsep keadilan restoratif.

Salah satu kasus tindak pidana korupsi dibawah Rp. 100 juta yang diselesaikan melalui keadilan restoratif yaitu kasus Penghulu Kampung Empang Pandan yang melakukan penyelewengan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 15.000.000. Kasus tersebut dalam tahap penyidikan, namun tersangka sudah mengembalikan seluruhnya kerugian negara. Sehingga kejaksaan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap kasus tersebut.

Berbeda dengan kasus tersebut, salah satu kasus tindak pidana korupsi yang juga dibawah Rp. 100 Juta yaitu kasus dengan Nomor Perkara 16/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr yang menyebabkan kerugian negara sebanyak Rp. 40.500.000 dengan terdakwa Jafar Sidik pada dugaan pembuatan dokumen pembiayaan fiktif dalam proyek pengadaan makanan dan minuman untuk kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Riau. Perkara tersebut telah diputus oleh hakim dengan menyatakan bahwa Jafar Sidik bersalah, namun yang menjadi perhatian yaitu kasus tindak pidana korupsi ini tetap dilanjutkan hingga ke pengadilan dan tidak menggunakan proses *restorative justice* meskipun kerugian keuangan negara berskala kecil. Sehingga, surat edaran tadi menimbulkan ketidakjelasan dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan permasalahan yang telah Penulis paparkan diatas, Penulis merasa sangat perlu adanya penelitian mengenai bagaimana sebenarnya penyelesaian kasus korupsi dengan kerugian kecil menggunakan prinsip *restorative justice* dan berdasarkan pada Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor: B-1113/F/Fd.1/05/2010 tentang Prioritas dan Pencapaian Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi. Atas dasar pemikiran ini maka Penulis melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk

skripsi dengan judul “*Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Dengan Kerugian Negara Yang Kecil Oleh Kejaksaan Tinggi Riau*”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan konsep keadilan restoratif sesuai Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: B-113/F/Fd.1/05/2010 dalam penyelesaian tindak pidana korupsi dengan kerugian kecil di Kejaksaan Tinggi Riau?
2. Apakah yang menjadi hambatan dalam penerapan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: B-113/F/Fd.1/05/2010 dalam penyelesaian tindak pidana korupsi dengan kerugian negara yang kecil?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk diketahui cara penyelesaian tindak pidana korupsi dengan kerugian kecil menggunakan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: B-113/F/Fd.1/05/2010 berdasarkan konsep keadilan restoratif di Kejaksaan Tinggi Riau;
- b. Untuk diketahui hambatan dalam pelaksanaan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: B-113/F/Fd.1/05/2010 dalam penyelesaian tindak pidana korupsi dengan kerugian negara yang kecil.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kegunaan bagi Penulis yakni sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum di Universitas Riau;
- b. Kegunaan Bagi Dunia Akademik yakni diharapkan penelitian ini dapat menjadi salah satu sumber data untuk penelitian di masa depan yang berkaitan dan menjadi pertimbangan

kajian di masa mendatang yang terkait dengan penelitian Penulis;

- c. Kegunaan Bagi Instansi Terkait yakni diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan dan saran kepada semua pihak. Khususnya terhadap instansi yang terkait mengenai implementasi keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana korupsi dengan kerugian negara yang kecil oleh Kejaksaan Tinggi Riau untuk meningkatkan profesionalisme dan kredibilitas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

D. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegak hukum dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.⁷

Sedangkan, pengertian penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Lebih lanjut, Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3, yaitu:⁸

- a. *Total Enforcement*

Yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*).

- b. *Full Enforcement*

Setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi area of no

enforcement dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan menegakan hukum secara maksimal.

- c. *Actual Enforcement*

Adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya diskresi dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law*) yang melibatkan berbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk di dalamnya lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penegakan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi, yaitu:⁹

- a. Penegakan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
- b. Penegakan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara berbagai aparat penegak hukum yang merupakan sub system peradilan di atas.
- c. Penegakan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan berbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat. Sehubungan dengan berbagai dimensi di atas dapat dikatakan bahwa sebenarnya hasil

⁷ Harun M. Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta: 1990, hlm. 58

⁸ Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta: 1988, hlm. 32.

⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Prenada Media, Jakarta: 2018, hlm. 75.

penerapan hukum pidana harus menggambarkan keseluruhan hasil interaksi antara hukum, praktek administratif dan pelaku sosial.

2. Teori *Restorative Justice*

Konsep *Restorative Justice* merupakan suatu perkembangan dari pemikiran manusia yang didasarkan pada tradisi-tradisi peradilan dari peradaban bangsa-bangsa Arab purba, bangsa Yunani dan bangsa Romawi dalam menyelesaikan masalah termasuk penyelesaian masalah tindak pidana. Istilah umum tentang *Restorative Justice* diperkenalkan untuk pertama kali oleh Albert Eglash pada tahun 1959 dalam artikelnya yang berjudul *Creative Restitution: Its Roots in Psychiatry, Religion and Law*.

Menurut Tina S, cara kuno dan yang paling sering digunakan untuk keadilan restoratif, yaitu mempertemukan antara korban dan pelaku yang biasanya disebut mediasi antara korban-pelaku. Dalam jurnalnya disebutkan, “*This process involves bringing the victim and the offender together to resolve their individual issues in reference to the crime committed. The process is ideally a healing one in which the victims have the opportunity to meet offenders, discuss how the crime has impacted their lives, discuss the physical, emotional, and financial impact of the crime, and receive answers to lingering questions about the crime and the offender.*”¹⁰

Menurut Jonlar Purba, *Restorative Justice* adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan perlibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan

dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana saat ini.¹¹ Lebih lanjut, *Restorative Justice* lebih mengedepankan proses dimana semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah, dan bagaimana menangani akibat dimasa yang akan datang. Sehingga keadilan yang diharapkan kedua belah pihak yaitu keadilan responsif (*real justice*) dapat terwujud.¹²

Gabbay dalam jurnalnya yang berjudul “*Exploring The Limits Of The Restorative Justice Paradigm: Restorative Justice And White-Collar Crime*” menyebutkan bahwasanya *restorative justice* dapat digunakan meskipun kejahatan tersebut kejahatan kerah putih atau *restorative justice interventions are warranted and possible even in high-profile white-collar crime*.¹³

Sementara itu, menurut Gerry Johnstone dan Daniel W. Van Ness sebagaimana dikutip oleh Bambang Waluyo, secara konseptual *restorative justice* dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) konsep, yaitu:¹⁴

a. *Encounter Conception*

Konsep ini memandang keadilan restoratif sebagai suatu proses penyelesaian persoalan yang

¹¹ Jonlar Purba, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*, Jala Permata Aksara, Jakarta 2017, hlm. 56.

¹² Davit Rahmadan, "Pidana mati ditinjau dari sudut pandang hak asasi manusia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No.1 Agustus 2010, hlm. 146.

¹³ Zvi D. Gabbay, *Exploring The Limits Of The Restorative Justice Paradigm: Restorative Justice And White-Collar Crime*, Cradozo Journal of Conflict Resolution Spring, Volume 8.2 2007, hlm. 8.

¹⁴ Gerry Johnstone and Daniel W. Van Ness, *Handbook of Restorative Justice*, Willan Publishing, United Kingdom: 2007, hlm. 8-16. dan Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaaan Pada Restorative Justice*, Rajawali Pers, Jakarta: 2017, hlm. 41.

¹⁰ Tina S. Ikpa, *Balancing Restorative Justice Principles and Due Process Rights in Order to Reform the Criminal Justice System*, 24 Washington University Journal of Law & Policy 301, 308-09 (2007)

ditimbulkan dari suatu kriminalitas dengan cara mempertemukan korban, pelaku dan pemangku kepentingan lainnya dalam suatu forum informal yang demokratis untuk menemukan solusi yang positif.

b. *Reparative Justice Conception*

Konsep ini memandang keadilan restoratif sebagai suatu konsepsi keadilan yang mengutamakan pemulihan terhadap kerugian (*harm*) daripada sekedar memberikan penderitaan kepada pelakunya.

c. *Transformative Conception*

Konsep ini memandang keadilan restoratif sebagai suatu *way of life*. Pendukung konsep ini memandang *restorative justice* bukan hanya soal perubahan pendekatan terhadap kejahatan tetapi harus lebih jauh lagi, yaitu dalam rangka mencapai suatu masyarakat yang adil (*achieving a just society*), yang hanya dapat dicapai melalui transformasi untuk memahami keberadaan setiap orang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat dan lingkungan.

E. Kerangka Konseptual

1. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan ataupun pengembangan versi kerja sistem dari desain yang diberikan.¹⁵
2. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian

yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.¹⁶

3. Tindak Pidana Korupsi adalah suatu perbuatan curang yang merugikan keuangan negara. Atau penyelewengan atau penggelapan uang negara untuk kepentingan pribadi dan orang lain.¹⁷
4. Kerugian Negara adalah nilai kerugian yang dituntut sebesar kerugian yang terjadi, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Sifat kerugiannya adalah nyata dan pasti (telah terjadi).¹⁸
5. Kejaksaan Tinggi adalah instansi vertikal di wilayah yang berkedudukan di tiap-tiap ibukota propinsi/daerah tingkat 1 dengan daerah hukum yang sama dengan wilayah administrasi/daerah tingkat 1 yang bersangkutan.¹⁹ Dalam penulisan ini pada Kejaksaan Tinggi Riau.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, artinya meninjau keadaan permasalahan yang ada di lapangan dikaitkan dengan aspek hukum yang berlaku di dalam masyarakat dan yang mengatur permasalahan tersebut. Karena dalam penelitian ini Penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti. Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan berbagai fakta

¹⁶ Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*.

¹⁷ Aziz Syamsudin, , *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta: 2011, hlm 15.

¹⁸ Theodorus M. Tuankotta, *Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Salemba Empat, Jakarta: 2009, hlm.90

¹⁹ Pasal 28 ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1992 Tentang *Pokok-Pokok Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia*.

¹⁵KBBI, 2019. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). [Online] available at <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> diakses pada tanggal 4 September 2019.

gejala dan fakta yang terdapat dalam kehidupan sosial secara mendalam.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kejaksaan Tinggi Riau, karena kejaksaan memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, dan kejaksaan mempunyai arsip dan dokumen yang lengkap mengenai kasus-kasus yang hendak Penulis teliti.

3. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda, kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.²⁰ Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Asisten Pidsus Kejati Riau.

4. Sumber Data

Dalam sebuah penelitian hukum sosiologis terbagi menjadi 3 yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang sesuai dengan permasalahan. Disini Penulis memperoleh data primer dari para responden.

b. Data sekunder

1) **Bahan Hukum Primer**, yaitu bahan-bahan hukum mengikat yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

- d) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- e) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
- f) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1992 Tentang Pokok-Pokok Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia, dan
- g) Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor B-1113/F/Fd.1/05/2010 perihal Prioritas dan Pencapaian dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi.

2) **Bahan Hukum Sekunder**, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan sebagainya.

3) **Bahan Hukum Tersier**, bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti buku-buku, jurnal, laporan hasil penelitian berbagai jenis disiplin ilmu yang mempunyai relevansi dengan objek permasalahan yang hendak diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode penulisan dalam karya ilmiah ini adalah penelitian sosiologis. Pengumpulan data dilakukan dengan metode :

a. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah situasi peran antara pribadi bertatap-muka (*face-to-face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh

²⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2011, hlm. 118.

jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.²¹

b. **Kajian Kepustakaan**

Yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dengan berbagai sumber seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal hukum, dokumen resmi, publikasi, kamus Bahasa Indonesia, pendapat sarjana, internet dan bahan lainnya yang sangat berkaitan dengan penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan pengamatan, dan penggunaan-penggunaan teori kurang diperlukan.²² Dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode secara deduktif, yaitu menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus, yang mana dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Korupsi

Korupsi adalah tindakan seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan maksud untuk memperoleh suatu keuntungan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban orang lain. Seorang pejabat yang melakukan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya atau orang lain, bertentangan dengan hak dan kewajiban orang lain.²³

B. Tinjauan Umum Tentang Keadilan Restoratif

UNODC (*United Nations Office on Drugs and Crime*) dalam buku yang berjudul “*Handbook on Restorative Justice Programmes*”, di dalamnya disebutkan pengertian *restorative justice* adalah:²⁴ “*Restorative justice is an approach to problem solving that, in its various forms, involves the victim, the offender, their social networks, justice agencies and the community. Restorative justice programmes are based on the fundamental principle that criminal behaviour not only violates the law, but also injures victims and the community*”

Penerapan keadilan restoratif setidaknya harus memenuhi 3 (tiga) hal berikut ini: *pertama*, mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kerugian/kerusakan (*identifying and taking steps to repair harm*); *kedua*, melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*involving all stakeholders*); dan *ketiga*, transformasi dari pola di mana negara dan masyarakat menghadapi pelaku dengan pengenaan sanksi pidana menjadi pola hubungan kooperatif antara pelaku di satu sisi dengan masyarakat/korban dalam menyelesaikan masalah akibat kejahatan (*transforming the traditional relationship between communities and their government in responding to crime*).²⁵

Pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana korupsi masih disikapi secara kontroversial karena dianggap bahwa keadilan restoratif hanya berlaku untuk korban yang nyata

²¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta: 2012, hlm. 82.

²² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 77.

²³ Amirudin, *Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, Genta Publishing, Yogyakarta: 2010, hlm. 29.

²⁴ Yvon Dandurand, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, United Nations Office on Drugs and Crime, Viena: 2006, hlm. 6.

²⁵ Mc Cold and Wachtel, “Restorative Justice, The International Institute for Restorative Practice (IIRP)”, *Kluger Publications Journal*, New York Criminal Justice Press & Amsterdam, 2003, hlm. 7

(individu) atau sekelompok masyarakat dan tidak dapat diberlakukan terhadap tindak pidana yang korbannya negara atau kepentingan pembangunan nasional sehingga untuk bisa dimediasikan adalah hal yang mustahil. Namun terhadap pendapat tersebut, Marwan Effendy mengungkapkan gagasannya bahwa keadilan restoratif dapat digunakan dalam tindak pidana korupsi, tidak seperti keadilan restoratif pada tindak pidana umum yang harus melibatkan keterlibatan para pihak korban, pelaku dan masyarakat, terkait masalah korupsi bertitik berat kepada pengembalian keuangan Negara.²⁶ Hal ini sesuai dengan tujuan diciptakannya hukum, yaitu sebagai suatu sarana atau instrumen untuk mengatur hak-hak dan kewajiban subjek hukum agar masing-masing subjek hukum dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dan mendapatkan haknya secara wajar.²⁷

C. Tinjauan Umum Tentang Asas Kebijaksanaan Menuntut

Bambang Waluyo dalam bukunya yang berjudul “Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice” memberikan pengertian tentang asas kebijaksanaan menuntut, yaitu Asas kebijaksanaan menuntut pada hakikatnya memberikan kewenangan kepada jaksa untuk menuntut atau tidak menuntut suatu perkara pidana, baik dengan syarat maupun tanpa syarat.²⁸

Kewenangan jaksa untuk tidak melakukan penuntutan perkara pidana didasarkan pada asas oportunitas atau disebut juga asas kebijaksanaan menuntut.

Asas oportunitas membolehkan jaksa tidak menuntut perkara pidana, bila mana penuntutan tidak patut dilakukan atau bilamana penuntutan itu akan merugikan kepentingan umum atau negara, sekalipun saksi dan buktinya cukup. Dalam rumusan lain disebut “penghentian penuntutan karena alasan kebijakan (*policy*)” atau dalam bahasa sehari-hari disebut “mengesampingkan perkara” atau *deponering*.²⁹

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Provinsi Riau

Seiring dengan berhembusnya “angin reformasi” telah memberikan perubahan yang drastis terhadap negeri ini, tidak terkecuali di Provinsi Riau sendiri. Salah satu perwujudannya adalah dengan diberlakukannya pelaksanaan otonomi daerah yang mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2001. Hal ini berimplikasi terhadap timbulnya daerah-daerah baru di Indonesia, dari 27 Provinsi pada awalnya sekarang sudah menjadi 32 Provinsi mulai tanggal 1 Juli 2004 Kepulauan Riau resmi menjadi provinsi ke-32 di Indonesia, itu berarti Provinsi yang dulunya terdiri dari 16 Kabupaten/Kota sekarang hanya menjadi 12 Kabupaten.³⁰

B. Gambaran umum Kejaksaan Tinggi Riau

Kejaksaan Tinggi Riau adalah jajaran Kejaksaan RI yang memiliki daerah tugas di wilayah Provinsi Riau. Instansi yang berkantor di Jl. Jenderal Sudirman No. 375, Pekanbaru dan Telepon 0761-29677. Kejaksaan Tinggi ini terdiri atas satu Kejaksaan Negeri Tipe A (Kejaksaan Negeri Pekanbaru), sepuluh Kejaksaan Negeri Tipe B (Kejaksaan

²⁶https://aai.or.id/v3/index.php?option=com_content&view=article&id=186:kebijaksanaan-restorative-justice-masalah-tindak-pidana-korupsi&catid=87&itemid=55&showall=1&limitstart, Diakses pada tanggal 19 April 2020.

²⁷ Evi Deliana HZ, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Konten Berbahaya Dalam Media Cetak dan Elektronik", Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 3, No. 1 2012, hlm. 7.

²⁸ Bambang Waluyo, Op. Cit, hlm. 55.

²⁹ *Ibid*, hlm. 202

³⁰ <https://www.riauaktual.com>, diakses pada tanggal 3 Desember 2019.

Negeri Rengat, Dumai, Bengkulu, Tembilahan, Bangkinang, Pasir Pangaraian, Siak Sri Indrapura, Teluk Kuantan, Pangkalan Kerinci, Ujung Tanjung dan satu cabang Kejaksaan Negeri (Cabang Kejaksaan Negeri Bengkulu di Selat Panjang). Jumlah pegawai Kejaksaan se-Riau mencapai 446 orang, yang terdiri atas 208 orang Jaksa dan 238 orang Tata Usaha.³¹

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Konsep Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Dengan Kerugian Kecil Sesuai Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: B-113/F/Fd.1/05/2010

Korupsi merupakan akar dari segala permasalahan bangsa dan menjadi penyebab utama terjadinya kemiskinan.³² Mahatma Gandhi pernah menyebutkan bahwa korupsi merupakan bentuk pelanggaran yang terburuk, hal ini disebabkan karena korupsi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, Pak Hung Mo dalam tulisannya yang berjudul "Corruption and Economic Growth" menyebutkan:³³

"We find that a 1% increase in the corruption level reduces the economy growth rate by about 0.72% or, expressed differently, a one-unit increase in the corruption index reduces the growth rate by 0.545 percentage points."

Penelitian tersebut menunjukkan bahwa setiap 1% level korupsi meningkat, maka mengakibatkan turunnya rasio

pertumbuhan ekonomi sebanyak 0.72% atau, bertambahnya 1 unit dalam indeks korupsi dapat menurunkan rasio pertumbuhan ekonomi sebanyak 0.545 poin. Mengenai hal tersebut, hukum okun menyebutkan bahwa tanpa adanya pertumbuhan ekonomi, maka tingkat pengangguran akan meningkat 0,3% dari satu kuartal ke kuartal berikutnya.³⁴ Dapat disimpulkan, bahwa apabila terus meningkatnya level korupsi, maka dapat mengakibatkan meningkatnya tingkat pengangguran di masyarakat.

Dengan demikian, pelaku tindak pidana korupsi sangat bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya, karena perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian terhadap bangsa Indonesia. Maka dari itu, pelaku tindak pidana korupsi harus bertanggungjawab untuk mengembalikan kerugian negara atas korupsi yang mereka lakukan.

Bambang Waluyo dalam bukunya yang berjudul "Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi" menyebutkan, bahwa dalam perkara korupsi negara dapat menjadi korban tindak pidana korupsi karena adanya kerugian keuangan negara dan perekonomian negara, kualitas kehidupan, rusaknya infrastruktur dan sebagainya.³⁵

Penyelesaian tindak pidana korupsi menurut United Convention Against Corruption (UNCAC) harus berfokus pada pengembalian aset (*asset recovery*). Salah satu konsep pengembalian aset yang dapat dilakukan oleh Kejaksaan yaitu dengan keadilan restoratif. Konsep penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif merupakan mekanisme penyelesaian perkara yang

³¹ Wawancara dengan Bapak Davit Pujakusuma, SH. Bagian Tata Usaha Kejaksaan Tinggi Riau, Hari Jumat, tanggal 22 Mei 2020, Bertempat di Kejaksaan Tinggi Riau.

³² Bambang Waluyo, *Op. Cit.*, hlm. 8.

³³ Pak Hung Mo, "Corruption and Economic Growth", *Journal of Comparative Economics*, School of Business, Hong Kong Baptist University, Vol. 29, November 2000, hlm. 76.

³⁴ Mayra Astari, "Hukum Okun: Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran di Indonesia", Thesis, Program Pascasarjana Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2019, hlm. 40.

³⁵ Bambang Waluyo, *Op. Cit.*, hlm. 12.

menitikberatkan pada melibatkan antara pelaku dan korban. Penyelesaian tindak pidana korupsi dengan konsep keadilan restoratif dapat dilihat dari Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: B-113/F/Fd.1/05/2010 tentang Prioritas dan Pencapaian dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.

Di dalam SEJA tersebut, Jaksa Agung memberikan pendapat sebagai berikut:

"...bagi masyarakat yang dengan kesadarannya telah mengembalikan kerugian keuangan negara (restoratif justice), terutama terkait perkara tindak pidana korupsi yang nilai kerugian keuangan negara relatif kecil perlu dipertimbangkan untuk tidak ditindaklanjuti...."

Pertimbangan tersebut didasarkan pada gagasan bahwa penanganan perkara tindak pidana korupsi yang relatif kecil dirasa tidak efektif karena biaya operasionalnya yang jauh lebih besar. Menurut Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Riau Bapak Subekhan, beliau menyebutkan "Pada saat FGD (*Focus Group Discussion*) dengan Kejaksaan Agung, nominal korupsi yang dianggap kecil itu adalah dibawah Rp. 100 Juta.³⁶

Sedangkan, biaya penanganan perkara korupsi di lembaga Kejaksaan mencapai Rp. 200 juta untuk satu kasus tindak pidana korupsi hingga tuntas. Rinciannya, Rp. 25 juta untuk tahap penyelidikan, Rp. 50 juta untuk tahap penyidikan, Rp. 100 juta untuk tahap penuntutan, dan sisanya Rp. 25 juta untuk eksekusi putusan yang sudah *inkracht*.³⁷

Dalam prakteknya, proses penyelesaian tindak pidana korupsi dengan kerugian kecil menggunakan pendekatan keadilan restoratif sesuai SEJA dilakukan dengan proses dan tata cara sebagai berikut:³⁸

1. Penyidik tetap melakukan tindakan sesuai SOP (*standard operating procedure*) namun juga harus sejalan dengan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: B-113/F/Fd.1/05/2010;
2. Penyidik dalam hal ini kejaksaan, memanggil pelaku untuk melakukan proses mediasi pengembalian kerugian keuangan negara;
3. Proses mediasi wajib diikuti oleh Pelaku, Korban (dalam hal ini Negara dan diwakili oleh Kejaksaan), dan pihak-pihak lainnya seperti Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Tujuan utama mediasi dilakukan untuk menyepakati pengembalian penuh seluruh kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pelaku;
5. Apabila mediasi disepakati oleh para pihak, dan pelaku bersedia mengembalikan seluruh kerugian negara, maka hasil mediasi dituangkan dalam bentuk surat perdamaian yang ditandatangani di atas materai oleh para pihak;
6. Surat perdamaian tersebut kemudian diserahkan kepada penyidik sebagai bahan pertimbangan untuk diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3);
7. Apabila proses mediasi dilakukan pada saat penyelidikan, maka dapat diterbitkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan A2

³⁶ Wawancara dengan Bapak Subekhan, SH.,MH, Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Riau, Hari Selasa, tanggal 16 April 2019, Bertempat di Kejaksaan Tinggi Riau.

³⁷

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5733f0ea01aea>

[/mau-tahu-biaya-penanganan-perkara-korupsi-simak-angka-dan-masalahnya/](#) diakses pada tanggal 15 Juni 2020.

³⁸ Wawancara dengan Bapak Hilman Azazi, SH.,MH, Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Riau, Hari Jumat, tanggal 22 Mei 2020, Bertempat di Kejaksaan Tinggi Riau.

(perkara tidak dapat ditingkatkan ke penyidikan).

Apabila perkara telah sampai pada tahap penuntutan, maka dapat diterbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) P-26.

Perlunya perkara tindak pidana korupsi yang nilai kerugiannya sebesar Rp. 100 Juta ke bawah diselesaikan di luar pengadilan melalui pendekatan keadilan restoratif, didasari pertimbangan sebagai berikut:

1. Upaya penanganan perkara korupsi membutuhkan waktu, biaya dan tenaga yang cukup besar, seiring dengan proses pemeriksaan persidangan yang harus dilakukan di Ibukota Provinsi (Pengadilan IA).
2. Dengan dikesampingkannya penuntutan perkara korupsi yang nilai kerugiannya Rp. 100 Juta ke bawah, maka aparaturnya penegak hukum (khususnya jaksa) dapat lebih berkonsentrasi dalam menangani kasus-kasus korupsi yang besar.
3. Biaya penanganan perkara korupsi yang dikeluarkan tidak sebanding dengan nilai kerugian negara. Adapun biaya penanganan perkara korupsi, mulai dari tahap penyelidikan sampai eksekusi, berdasarkan hasil penelitian Pusat Litbang Kejaksaan Agung pada 6 (enam) wilayah hukum Kejaksaan Tinggi ialah: Aceh (Rp. 303 Juta), Jambi (Rp. 281 Juta), Bangka Belitung (Rp. 290 Juta), Kalimantan Barat (Rp. 309 Juta), Jawa Timur (Rp. 296 Juta), dan Papua (Rp. 413 Juta).³⁹
4. Prinsip fundamental UNCAC 2003 pada dasarnya memprioritaskan pengembalian kerugian keuangan negara (*asset recovery*), bukan pembalasan terhadap pelaku.

³⁹ B.D Srimarsita, et. al., *Naskah Laporan Penelitian Tentang Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Pusat Litbang Kejaksaan Agung RI, Jakarta: 2014, hlm. 80.

B. Hambatan-Hambatan dalam penerapan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: B-113/F/Fd.1/05/2010 dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi dengan Kerugian Negara yang Kecil

Berkaitan dengan penerapan SEJA dalam penyelesaian tindak pidana korupsi dengan kerugian negara yang kecil, tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Kejaksaan dalam penerapannya. Adapun yang menjadi hambatan-hambatan (baik hambatan eksternal maupun hambatan internal) yang menyebabkan terhambatnya penerapan konsep keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana korupsi dengan kerugian negara yang kecil adalah sebagai berikut:

1. Hambatan Eksternal:

a. Kerugian Negara Tidak Dapat Dikembalikan

Fokus utama dari penerapan keadilan restoratif terhadap tindak pidana korupsi yaitu untuk mengembalikan kerugian negara seutuhnya. Namun seringkali pelaku tindak pidana korupsi sudah terlanjur menghabiskan hasil dari tindak pidana korupsi tersebut.⁴⁰

b. Pelaku yang Tidak Kooperatif

Dalam menerapkan konsep keadilan restoratif, peran pelaku harus lebih aktif dalam melakukan inisiasi damai terhadap permasalahan yang timbul atas tindak pidana korupsi. Pelaku yang tidak kooperatif dengan penegak hukum tentunya menghambat proses penerapan keadilan restoratif, contohnya pelaku yang menolak mengaku bersalah.⁴¹

⁴⁰ Wawancara dengan Bapak Hilman Azazi, SH.,MH, Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Riau, Hari Jumat, tanggal 22 Mei 2020, Bertempat di Kejaksaan Tinggi Riau.

⁴¹ *Ibid.*

2. Hambatan Internal:

a. Kedudukan hukum SEJA

Dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia, surat edaran tidak termasuk kedalam peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dimana surat edaran tidak termasuk sebagai peraturan perundang-undangan.

b. Penentuan Batasan Kerugian Dalam SEJA Penentuan Batasan Kerugian Dalam SEJA

Dalam SEJA tersebut, tidak disebutkan secara tertulis batasan kerugian negara yang dianggap “kecil”. Sehingga menyulitkan Kejaksaan untuk menentukan kasus korupsi mana yang dapat diterapkan keadilan restoratif.

c. Struktur Birokrasi Kejaksaan

Menurut Bambang Waluyo, struktur birokrasi di Kejaksaan masih kental dengan nuansa kesatuan komando. Sehingga dominasi pimpinan sangat kental dalam membuat suatu kebijaksanaan (diskresi) penyidikan ataupun penuntutan.⁴²

kerugian keuangan negara. Namun kasus yang dapat diselesaikan dengan keadilan restoratif dibatasi pada sifat perkara yang bersifat *big fish* (berskala besar, pelaku dan kerugian negara), dan still going on (tindak pidana korupsi yang dilakukan terus menerus).dilakukan oleh kejaksaan dengan cara penerbitan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan A2 (perkara tidak dapat ditingkatkan ke penyidikan), Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), dan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) P-26.

2. Hambatan dalam penerapan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: B-113/F/Fd.1/05/2010 terbagi atas 2, pertama, hambatan eksternal yaitu seperti kerugian negara yang tidak dapat dikembalikan oleh pelaku, pelaku yang tidak kooperatif, hambatan-hambatan ini dikatakan hambatan eksternal karena masalahnya terletak pada pelaku tindak pidana korupsi. Kedua, hambatan internal yaitu seperti kedudukan hukum SEJA, tidak adanya penentuan batasan kerugian di dalam SEJA, dan struktur birokrasi kejaksaan yang bernuansa komando, dapat dikatakan hambatan ini terletak pada instansi kejaksaan itu sendiri.

B. Saran

1. Kepada aparat penegak hukum terutama kejaksaan hendaknya dapat mengedepankan konsep keadilan restoratif dalam penanganan kasus korupsi dengan kerugian kecil, mengingat manfaat yang diberikan lebih besar. Serta menitikberatkan pada pemulihan aset (*asset recovery*) terhadap kerugian keuangan negara, bukan hanya mengedepankan pembalasan pidana bagi pelaku.
2. Untuk mengatasi hambatan dalam penerapan konsep keadilan restoratif

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Penulis, maka Penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyelesaian tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian negara yang kecil berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor B-113/F/Fd.1/05/2010 dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif penyelesaiannya harus mengutamakan pengembalian

⁴² Bambang Waluyo, Op. Cit, hlm. 263

dalam penyelesaian kasus tindak pidana korupsi, hendaknya segera membentuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelesaian tindak pidana dengan konsep keadilan restoratif. Sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan konsep keadilan restoratif dapat dipergunakan kedepannya secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Amirudin, 2010, *Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Amiruddin, Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Arief, Barda Nawawi, 2018, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Prenada Media, Jakarta.

B.D Srimarsita, et. al., 2014, *Naskah Laporan Penelitian Tentang Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Pusat Litbang Kejaksaan Agung RI, Jakarta.

Dandurand, Yvon, 2006, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, United Nations Office on Drugs and Crime, Viena.

Hamzah, Andi, 2004, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Husen, Harun M, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.

Mochtar, Akil, 2006, *Memberantas Korupsi Efektivitas Sistem Pembalikan Beban*

Pembuktian dalam Gratifikasi, Q-Communication, Jakarta.

Purba, Jonlar, 2017, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*, Jala Permata Aksara, Jakarta.

Shant, Dellyana, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

Sunggono, Bambang, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Syamsudin, Aziz, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.

Tuankotta, M. Theodorus, 2009, *Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Salemba Empat, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 2017, *Desain Fungsi Kejaksaan pada Restorative Justice*, RajawaliPers, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 2016, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal/Kamus/Makalah

Deliana HZ, Evi, 2012, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Konten Berbahaya Dalam Media Cetak dan Elektronik", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 3, No. 1.

Gabbay, Zvi, 2007, "Exploring The Limits of The Restorative Justice Paradigm: Restorative Justice And White-Collar Crime", *Cradozo Journal of Conflict Resolution Spring*, Volume 8.2. *Journal Westlaw*, diakses pada tanggal 15 Juni 2019.

Indra, Mexasasai, 2014, "Rekonseptualisasi pengaturan pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi", *Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau*, Volume 4, No. 3 September.

Mo, Pak Hung, "Corruption and Economic Growth", *Journal of Comparative Economics, School of Business, Hong Kong Baptist University*, Vol. 29 November.

Rahmadan, Davit, 2010, "Pidana Mati Ditinjau Dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau*, Edisi I, No. 1 Agustus.

Tina S. Ikpa, 2007, "Balancing Restorative Justice Principles and Due Process Rights in Order to Reform the Criminal Justice System", *Washington University Journal of Law & Policy* 301, August. *Journal Westlaw*, diakses pada tanggal 15 Juni 2019.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874.